

## **ORANG KRISTEN DALAM KONTESTASI POLITIK INDONESIA: PARKINDO, 1945-1973**

**Petra Wahyu Utama, M.Hum**  
Universitas Khairun  
email: petrawahyu.utama@unkhair.ac.id

### **Abstrak**

Artikel ini membahas tentang kiprah tokoh-tokoh Kristen yang berkecimpung dalam politik yang kemudian diwadahi dalam sebuah partai yakni Parkindo. Penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode sejarah ini mendapati bahwa sejak Indonesia merdeka, dinamika politik tidak mungkin terlepas dari perjuangan dari para tokoh yang menggunakan basis pada keagamaan. Umat Kristen rupanya ikut berpartisipasi dengan menggunakan gerbong Parkindo dengan tujuan untuk mempertahankan dan memelihara kemerdekaan Indonesia. Meskipun minoritas, umat Kristen ternyata juga menjadi ceruk suara dengan basis dukungan yang tersebar di beberapa wilayah di Indonesia. Potensi ini kemudian menghantarkan para kader Parkindo untuk masuk ke dalam jajaran eksekutif maupun legislatif.

Kata Kunci: Parkindo, Kristen, Politik

### **Abstract**

This article discusses the work of Christian figures who are involved in politics which are then accommodated in a party, namely Parkindo. Research conducted using this historical method found that since Indonesia's independence, political dynamics could not be separated from the struggles of figures who used religious bases. Christians apparently participated by using Parkindo carriages with the aim of maintaining and maintaining Indonesian independence. Although a minority, Christians have also become a niche voice with a support base spread across several regions in Indonesia. This potential then led Parkindo cadres to enter the executive and legislative ranks.

Keyword: Parkindo, Christian, Politics

### **Pendahuluan**

Perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia tidak terlepas dari keterlibatan dan perjuangan dari umat Kristen. Mereka turut secara aktif mendukung kemerdekaan, baik di medan perjuangan fisik maupun politik. Setelah Proklamasi Kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, keberadaan partai politik mendapat dukungan penuh dari Sukarno. Ia meyakini bahwa partai politik dapat memperkuat posisi kemerdekaan Indonesia. Oleh karenanya, pemerintah kemudian menerbitkan Maklumat Pemerintah 3 November 1945 untuk mendorong pembentukan partai politik sebanyak-banyaknya.

Kebijakan Sukarno menjadi angin segar bagi para tokoh bangsa untuk mendirikan partai politik. Tidak terkecuali, mereka yang beragama Kristen. Dengan antusias, para tokoh Kristen dan

Katolik seperti Dr. T.S.G. Moelia, Ds. B. Probowinoto, F. Laoh, Dr. W.Z. Johannes, J.K Panggabean, Marjoto, Abednego, Suradi dan Hadi kemudian bertemu untuk merencanakan pembentukan sebuah partai. Pada awalnya, tokoh Kristen dan Katolik masih menjadi satu haluan, namun karena beberapa perbedaan pandangan, mereka kemudian memutuskan untuk berjalan sendiri-sendiri sesuai dengan pandangannya masing-masing. Tokoh-tokoh Kristen kemudian mendirikan partai yang diberi nama Partai Kristen Nasional (PKN). Dr. W.Z. Johannes kemudian terpilih sebagai ketua umum dan partai ini diresmikan pada 10 November 1945. Namun demikian, eksistensi PKN tidak berlangsung lama. PKN mengalami perombakan ketika mereka mengadakan kongres pada 6-7 Desember 1945 di Surakarta. Anggota PKN menghendaki perubahan nama yang kemudian disetujui pergantian PKN menjadi Parkindo (Partai Kristen Indonesia).

Serangkaian upaya untuk menyatukan tokoh-tokoh Kristen lain kemudian dilakukan. Sembari menyusun kepengurusan partai menjadi lebih sistematis. Pada akhirnya, Parkindo resmi menjadi satu-satunya wadah politik bagi umat Kristen pada April 1947. Parkindo secara aktif memberikan sumbangsih pemikirannya kepada pemerintah. Hingga delapan tahun berselang Parkindo pun juga turut serta dalam kontestasi pemilu pertama kali di Indonesia pada 1955. Parkindo mampu berada di peringkat keenam dari 30-an partai yang ikut serta dalam pemilu. Parkindo berhasil meraih 1.003.326 suara yang menghantarkan delapan orang menjadi perwakilan di DPR RI. Adapun pada pemilihan anggota konstituante, Parkindo meraih 988.810 suara sehingga ada 16 kursi di konstituante yang dapat mereka raih.

Pergantian kekuasaan dari Sukarno ke Soeharto pun terjadi. Adapun hingga pemilu 1971 Parkindo masih eksis dalam mengikuti pesta demokrasi. Parkindo mampu meraih 733.359 suara dan mampu menghantarkan tujuh perwakilannya di DPR RI. Kondisi politik kemudian berubah ketika Soeharto mengeluarkan kebijakan Fusi pada 1973. Partai-partai kemudian disederhanakan dengan tujuan agar dapat menciptakan stabilitas politik pada kehidupan berbangsa. Kebijakan ini menandai berakhirnya Parkindo, karena mau tidak mau partai-partai yang ada sebelumnya harus bergabung ke Golkar, PDI, atau pun PPP. Parkindo kemudian memutuskan untuk melebur ke PDI bersama Partai Katolik, PNI, Murba dan IPKI.

### **Metode Penelitian**

Studi penelitian terhadap Parkindo menggunakan metode penelitian sejarah. Target dari penelitian sejarah adalah untuk membuka wawasan sejarah dalam bentuk tertulis, sebagai hasil dari proses rekonstruksi berdasarkan sumber sejarah dengan prosedur untuk pencapaian kebenaran

sejarah. Dengan demikian, diperlukan metode dalam penulisan sejarah yang bertumpu pada empat kegiatan pokok yaitu heuristik, kritik, interpertasi, dan historiografi (Gottschalk, 1986, p.32). Sumber utama yang digunakan ialah arsip, data-data statistik sezaman, maupun wawancara, dan sumber yang diperoleh dari surat kabar. Adapun sumber sekunder yang digunakan untuk menghasilkan gambaran utuh berdasarkan periode yang dipilih dengan menggunakan berbagai macam literatur seperti buku, jurnal, majalah yang berkaitan dengan eksistensi Parkindo pada kurun waktu 1947-1973.

### **Terbentuknya Partai Kristen Indonesia (Parkindo)**

Pada 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Pascakemerdekaan Sukarno dan pemerintahannya tentu membutuhkan dukungan secara politik. Oleh sebab itu, pemerintah kemudian mengeluarkan Maklumat Pemerintah No.X/Th.1945 pada 3 November 1945. Maklumat berisi anjuran tentang pembentukan partai-partai politik. Tujuannya agar pada Januari 1946, pemerintahan Indonesia sudah memiliki anggota perwakilan baik di DPR, MPR, maupun daerah (KPU, [kpu.go.id/page/read/32/sejarah-lembaga-penyelenggara-pemilu](http://kpu.go.id/page/read/32/sejarah-lembaga-penyelenggara-pemilu)). Maklumat tersebut disambut positif dari kalangan politisi. Mereka memandang bahwa pemerintah telah membuka peluang bagi berdirinya partai politik sesuai dengan paham yang dianut oleh masing-masing golongan (Polin, <https://narasisejarah.id/parkindo-lika-liku-partai-kristen-dalam-dunia-politik-indonesia/>).

Para tokoh Kristen dan Katolik seperti Dr. T.S.G. Moelia, Ds. B. Probowinoto, F. Laoh, Dr. W.Z. Johannes, J.K. Panggabean, Marjoto, Abednego, Suradi dan Hadi kemudian melakukan pertemuan di Jalan Kramat No. 65, Jakarta. Para tokoh itu kemudian membahas tentang rencana pembentukan partai politik dalam rangka menghadapi pemilu 1946 untuk memilih anggota parlemen. Akan tetapi, Suradi dan Hadi selaku perwakilan dari umat Katolik tidak bisa memberikan banyak respon tanpa arahan dari pimpinan gereja Katolik. Rencana pembentukan partai Kristen ini pun juga sempat mendapat penolakan dari pemuka agama Kristen. Mereka cenderung memiliki stigma negatif tentang politik kerana dipandang sebagai sesuatu yang kotor dan jauh dari nilai-nilai kekristenan (Ngelow, 1996, p.175-176).

Situasi dan tantangan yang terjadi tidak menyurutkan semangat di kalangan tokoh Kristen untuk membentuk partai politik. Meskipun sebagian besar tokoh masih awam terhadap dunia politik, namun partai Kristen berhasil didirikan pada 10 November 1945. Partai itu kemudian diberi nama Partai Kristen Nasional (PKN) dengan Ketua Umum Dr. W.Z. Johannes. PKN bisa dikatakan sebagai embrio dari lahirnya Parkindo, mengingat eksistensi PKN tidak begitu lama. Pada kongres 6-7 Desember 1945 di Surakarta, terjadi perubahan nama dari PKN menjadi Parkindo. Pengurus juga

dirombak yang kemudian menghasilkan susunan dengan Ketua Umum Ds. B. Probowinoto; wakil ketua I dan II yang dijabat oleh Dr. W.Z. Johannes dan Dr. R. Soemardi; Penulis I dan II yakni Mr. M. Tamboenan dan Marjoto S; Bendahara I dan II yang dijabat oleh J.K Panggabean dan Mr. S.S. Palengkahu (Hakh, 2018, p.7).

Minimnya sarana komunikasi pada saat itu, ternyata menimbulkan sedikit miskomunikasi antara para tokoh Parkindo dengan tokoh agama di Sumatera Utara. Masyarakat Kristen di Sumatera Utara ternyata juga menanggapi kebijakan pemerintah dengan membentuk sebuah partai Kristen yang diberi nama PARKI (Partai Kristen Indonesia). Akhirnya berdasarkan pertemuan kongres PARKI di Parapat pada 19-20 April 1947, mereka melebur menjadi satu bersama Parkindo. Peristiwa April 1947 itu telah menjadikan Parkindo sebagai satu-satunya wadah politik bagi umat Kristen di Indonesia (Hakh, 2018, p.7). Meskipun kenyataannya tidak semua umat Kristen bergabung dalam partai ini, mereka ada yang bergabung di PNI (Partai Nasional Indonesia), MURBA dan PSI (Partai Sosialis Indonesia). Sebagai saluran aspirasi umat Kristen, Parkindo kemudian secara aktif memberikan sumbangsih pemikirannya kepada pemerintah.

### **Parkindo dan Pemilihan Umum di Indonesia**

Pada masa pemerintahan Orde Lama, Parkindo bersama dengan partai politik lainnya meletakkan dasar-dasar berpijak yang kuat sebagai fondasi bagi penyelenggaraan pemerintahan. Parkindo berupaya untuk mempertahankan hubungan baik dengan presiden sebagai kepala negara. Adapun mereka selalu mengundang pihak pemerintah untuk menghadiri acara-acaranya yang bersifat nasional. Tujuannya tidak lain agar kebhinekaan dan marwah Pancasila terus terjaga.

Memasuki masa pemilu 1955, Parkindo juga turut serta dalam kontestasi dan bersaing dengan partai-partai lainnya. Partisipasi politik Parkindo pun mendapat dukungan dari Dewan Gereja Indonesia (DGI). Walaupun tidak diserukan secara eksplisit, dukungan DGI terhadap Parkindo itu sudah terlihat dalam seruan Sidang Lengkap III DGI pada 1 Juli 1953. Adapun DGI menghimbau:

1. Supaya seluruh anggota Gereja-gereja Kristen di Indonesia yang sudah memiliki hak untuk memilih, agar turut aktif memilih dan melaksanakan Pemilihan Umum untuk Konstituante.
2. Supaya pemilih-pemilih dapat dipimpin untuk memilih calon-calon yang berdasar pada kepercayaan Gereja Kristen yang sanggup dan paham memperjuangkan kepentingan masyarakat umum dan kepentingan umat Kristen khususnya.

Seruan ini kemudian didukung juga oleh Sidang Gereja Am Luar Biasa Gereja Protestan di Indonesia pada 31 Agustus 1955 dan dari gereja-gereja lainnya (Aritonang, 2009, p.195).

Pemilu nasional berlangsung dua tahap, yakni pada 29 September 1955 untuk pemilihan anggota Parlemen dan 15 Desember 1955 untuk Konstituante. Adapun perolehan 10 besar dari hasil Pemilu 1955 dapat dilihat pada tabel 1 berikut.

**Tabel 1. Rekapitulasi Hasil Pemilu 29 September dan 15 Desember 1955**

No	Nama Partai	Suara	Kursi DPR	Suara	Kursi Konstituante
1.	PNI	8.434.653	57	9.070.218	119
2.	Masyumi	7.903.886	57	7.789.619	112
3.	NU	6.955.141	45	6.989.333	91
4.	PKI	6.179.914	39	6.232.512	80
5.	PSII	1.091.160	8	1.059.922	16
6.	Parkindo	1.003.326	8	988.810	16
7.	Partai Katolik	770.740	6	748.591	10
8.	PSI	753.191	5	695.932	10
9.	IPKI	541.306	4	544.803	8
10.	Perti	483.014	4	465.359	7

Sumber: <https://www.kpu.go.id/page/read/8/pemilu-1955>, diolah.

Dari Pemilu 1955, Parkindo berhasil menempati urutan keenam dengan raihan 1.003.326 suara yang menghantarkan delapan orang kadernya menjadi perwakilan di DPR, kemudian 988.810 suara dengan hasil 16 kursi di konstituante. Raihan suara diperoleh dari daerah-daerah yang persentase penduduknya beragama Kristen, seperti halnya Sumatera Utara, Sulawesi Utara, Maluku, dan NTT (Feith, 1999, p. 115). Raihan suara dalam pemilu 1955 menjadikan Parkindo sebagai partai yang diperhitungkan, walaupun partai ini berasal dari golongan minoritas. Hasil tersebut menjadi catatan penting, bahwasanya betapa seriusnya perjuangan Parkindo kala itu untuk menempatkan wakil-wakil mereka baik di parlemen maupun konstituante.

Selama pemerintahan Presiden Sukarno, Parkindo selalu terwakili dalam Kabinet. Johannes Leimena selaku tokoh Parkindo pernah menduduki jabatan dari mulai Wakil Ketua Fraksi Parkindo di DPR, Menteri Kesehatan hingga sebagai Wakil Menteri Pertama II, dan Wakil Perdana Menteri (Waperdam) II. Tidak kurang dari tujuh kali, putra kebanggaan Maluku ini pernah menjadi Pejabat Presiden menggantikan Sukarno saat ia berdinasi ke luar negeri. Dari 16 anggota konstituante, ada juga putra Maluku yang duduk dalam perwakilannya yaitu Wilhelm Abraham Lokollo (Darmansyah, dkk., 2006, p. 71 & 77). Saat Sukarno memberlakukan Demokrasi Terpimpin (1959-1965) dan terjadi

pembubaran partai secara besar-besaran pada 1961, Parkindo bersama PNI, NU, PKI, Partai Katolik, Murba, PSII, dan IPKI masih dapat mempertahankan eksistensinya (Keppres No. 128 Tahun 1961).



Gambar 1. Johannes Leimena dan Wilhelm Abraham Lokollo  
Pejabat Presiden dan Anggota Konstituante Parkindo dari Maluku  
Sumber: <https://www.konstituante.net/>, Desember 1958.

Gejolak politik kemudian terjadi setelah Peristiwa 30 September 1965. Peta politik pun berubah. Partai Komunis Indonesia (PKI) dilarang dan Sukarno dilengserkan dari jabatannya. Soeharto kemudian berkuasa dan menyebut rezimnya sebagai Orde Baru. Pada awal kekuasaannya, Soeharto tetap memberikan ruang terhadap tokoh-tokoh untuk berkiprah di dalam kancah politik. Namun demikian, ada partai politik yang dilarang untuk kembali tampil seperti halnya Masyumi. Dalam Sidang Istimewa MPRS tahun 1967, Pejabat Presiden Soeharto menyetujui Ketetapan MPRS Nomor XLII Tahun 1968, yang isinya menetapkan, pemilu digelar selambat-lambatnya tanggal 3 Juli 1971. Para tokoh kemudian dipersilahkan untuk berpartisipasi melalui partai politik pada pemilu 1971.

Partai-partai seperti Partai Muslimin Indonesia (PARMUSI), Partai Katolik, Partai Serikat Islam Indonesia (PSII), Partai Nahdatul Ulama, Golongan Karya (GOLKAR), Partai Kristen Indonesia (PARKINDO), Partai Musyawarah Rakyat Banyak (MURBA), Partai Nasional Indonesia (PNI), Persatuan Tarbiah Islamiah (PERTI) dan Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI) kemudian berkontestasi untuk meraih suaranya (Sajili, 2000, p. 5). Adapun bentuk-bentuk kampanye yang diperbolehkan kala itu adalah rapat umum, pawai, keramaian umum, pesta umum, pertemuan umum, penyiaran melalui RRI/TVRI, penyebaran kepada umum dan/atau penempelan di tempat umum berupa poster, plakat, spanduk, brosur, tulisan, dan penggunaan media massa serta alat peraga lainnya (Danang, 2023, <https://kompaspedia.kompas.id/>).

Parkindo kemudian menggarap kembali wilayah yang menjadi lumbung suaranya seperti Ambon, Minahasa, Timor, Jawa, Sulawesi dan Sumatera. Adapun perolehan suara pada pemilu 1971 dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini.

**Tabel 2. Rekapitulasi Hasil Pemilu 1971**

No	Nama Partai	Suara	Jumlah Kursi
1.	Golongan Karya (Golkar)	34.348.673	236
2.	Nahdlatul Ulama (NU)	10.213.650	58
3.	Partai Muslimin Indonesia (Parmusi)	2.930.746	24
4.	Partai Nasional Indonesia (PNI)	3.793.266	20
5.	Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII)	1.308.237	10
6.	Partai Kristen Indonesia (Parkindo)	733.359	7
7.	Partai Katolik	603.740	3
8.	Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti)	381.309	2
9.	Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI)	338.403	0
10.	Partai Musyawarah Rakyat Banyak (Murba)	48.126	0

Sumber: <https://www.kpu.go.id/page/read/pemilu-1971>, diolah

Raihan 733.359 suara yang diperoleh Parkindo menempatkan tujuh kadernya melenggang menduduki kursi wakil rakyat di Senayan. Namun demikian Golkar yang notebene sebagai pendaang baru, langsung menggebrak dengan mendapatkan perolehan suara tertinggi. Kondisi inilah yang menyebabkan kursi parlemen dikuasai oleh Golkar. Golkar lalu menjadi alat politik Orde Baru untuk melegitimasi kekuasaannya. Golkar pun melakukan penetrasi dengan memperkuat pengaruhnya melalui para pemimpin birokrasi dan militer dari mulai wilayah perkotaan hingga ke desa-desa.

Dominasi Soeharto di bidang politik tentunya juga berpengaruh pada Parkindo. Apalagi pada 1972, Soeharto kemudian mengemukakan keinginannya untuk melakukan fusi kepada partai-partai yang ada. Tujuannya untuk menggabungkan partai politik yang dipandang memiliki haluan sama dalam hal ideologi. Padahal sebenarnya, Soeharto ingin membatasi dan mengawasi potensi gerakan tokoh politik yang dipandang dapat mengancam eksistensi kekuasaannya.

### **Kebijakan Fusi 1973**

Sebenarnya keinginan Soeharto untuk menyederhanakan partai politik sudah muncul pada 1970. Ide Soeharto tentang fusi sempat disampaikan dalam pidatonya di Kongres XII PNI pada 11 April 1970 di Semarang. Soeharto mengutarakannya dengan dasar Tap MPRS No. XXII/MPRS/1966 tentang Penyederhanaan Partai-partai Politik. Namun demikian untuk menghindari terjadi gejolak,

Soeharto mengizinkan pemilu 1971 tetap berlangsung. Setahun berselang setelah pemilu, Soeharto kembali mengungkapkan keinginannya untuk melakukan Fusi. Adapun Fusi benar-benar terjadi ketika MPR kemudian mengeluarkan ketetapan tentang GBHN yang menegaskan mengenai perlunya pengelompokan organisasi peserta pemilu pada 1973 (Salam, 1979, p. 49).

Terbitnya kebijakan itu memunculkan arti bahwa partai politik yang dipandang memiliki haluan yang sama akan digabungkan (fusi) ke dalam satu partai. Awalnya beberapa partai seperti PNI dan IPKI bisa menerima kebijakan tentang fusi. Adapun juga Parmusi yang pada akhirnya juga sependapat karena kebijakan fusi dipandang sesuai dengan rencana yang telah dibuat pada Kongres Umat Islam 1969. Akan tetapi, Parkindo sendiri dan Partai Katolik menunjukkan sikap kontra terhadap kebijakan ini. Mereka menolak bilamana pada kebijakan ini mereka akhirnya dimasukkan ke dalam golongan spiritualis. Parkindo dan Partai Katolik berkemauan untuk digabungkan dalam kelompok yang berhaluan nasionalis (Redaksi, 2021, <https://www.kompas.com/fusi-partai-1973>).

Sebenarnya, partai-partai kala itu tidak menduga bahwa fusi adalah bagian dari taktik Soeharto yang berusaha memastikan dirinya untuk tetap menduduki kursi kekuasaan. Fusi dilakukan untuk mempersempit gerak tokoh-tokoh politik yang berbasis ideologi karena dipandang dapat mengancam kedudukannya (Ward, 1970, p. 35). Pemilu 1973 yang memenangkan Golkar, mengakibatkan kursi DPR RI didominasi oleh perwakilan dari partai itu. Setidaknya ada 236 kursi, yang mana apabila di persentasekan sebanyak 62,8 persen. Golkar sebagai kendaraan politik Soeharto kala itu, semakin memuluskan keinginannya untuk melakukan fusi. Akhirnya, pada 5 Januari 1973 menjadi awal mula fusi itu terjadi. Ditandai dengan bergabungnya partai-partai Islam seperti NU, Parmusi, PSII, dan Perti ke dalam sebuah wadah yang dinamakan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Disusul pada 10 Januari 1973 dengan penggabungan partai-partai seperti PNI, Murba, IPKI, Partai Katolik, dan Parkindo yang berhaluan nasionalis ke dalam sebuah wadah yang bernama Partai Demokrasi Indonesia atau PDI (Indira, 2019, <https://tirto.id/sejarah-pemilu-1977-taktik-fusi-parpol-ala-soeharto-orde-baru>).





Gambar 2. Lambang Partai Hasil Fusi 1973  
Sumber: <https://pusmendik.kemdikbud.go.id/>

Partai-partai yang telah bergabung itu, secara langsung masuk ke dalam perangkap Soeharto. Mereka dibatasi pergerakannya. Soeharto melalui kekuasaannya berhasil menyetir PPP dan PDI melalui Direktorat Sospol di TNI AD dan Kementerian Dalam Negeri. Apalagi Parkindo yang bergabung di PDI kala itu. Kadernya berisi kaum minoritas, sehingga akibat fusi pergerakannya semakin tidak terlihat. Celaknya, fusi semakin merongrong ideologi asal dari partai-partai yang telah mengalami penggabungan. Mereka kemudian digerus oleh tekanan hingga hanya tersisa dua ideologi besar yakni Islam dan Nasional. Seiring perjalanan waktu, gerakan tokoh-tokoh politik pun lebih dipersempit lagi dengan penerbitan UU Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan. Terbitnya UU ini tak lain dan tak bukan adalah upaya untuk mengkondisikan kemenangan Partai Golkar pada Pemilu 1977. Golkar juga diperkuat melalui penggalangan aparatur sipil negara dan militer untuk meraih suara. Mereka digerakkan dari mulai kota besar hingga pelosok-pelosok pedesaan.

Manipulasi juga dilakukan dengan penetapan sistem pemilu yang proporsional dan tertutup. Sistem ini memaksa pemilih untuk menentukan pilihan tanpa harus tahu wajah dan nama dari anggota parlemen yang akan mewakilinya. Alhasil dengan adanya pengkondisian itu, Golkar kembali bisa memenangkan pemilu. Pada 1977, Golkar menang telak dengan perolehan 232 kursi atau 62,1 persen suara. Disusul PPP dengan 99 kursi atau 29,2 persen dan PDI dengan 29 kursi atau 8,6 persen suara di DPR RI. Tidak berhenti di situ, Soeharto juga memperkuat Fraksi ABRI dengan menempatkan 75 anggota di DPR RI kala itu. Bahkan menambahnya sebanyak 25 kursi sehingga menjadi 100 anggota pada 1985. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan untuk mendukung langkah-langkah Golkar di parlemen (Hastono, 1987, p. 57).

Kebijakan fusi 1973 menandai tamatnya eksistensi Parkindo dalam kancah politik nasional. Hingga sebelum meletusnya peristiwa Reformasi 1998, dinamika politik setelah fusi terlihat sangat

monoton. Bahkan sebelum hasil pemilu diumumkan, masyarakat sudah bisa memastikan bahwa Golkar akan memenangkan kontestasi dalam penyelenggaraan Pemilu. Soeharto dan lingkarannya telah mengkondisikannya sedemikian rupa. Terlebih sebagai pemimpin tertinggi kala itu, ia sangat dikenal sebagai presiden yang anti terhadap kritik. Terutama terkait dengan kebijakan-kebijakan yang telah diputuskannya. Dengan demikian, “Asal Bapak Senang” menjadikan pengkondisian kemenangan Golkar pada saat pemilu sebagai hal yang harus dilakukan oleh orang-orang yang berada di lingkaran Soeharto. Setidaknya karena upaya-upaya politik kotor itu, Soeharto berhasil mempertahankan kekuasaannya selama 32 tahun.

### **Kesimpulan**

Parkindo adalah partai yang dibentuk oleh tokoh-tokoh politik yang memeluk agama Kristen. Embrionya adalah Partai Kristen Nasional (PKN) yang berdiri pada 10 November 1945. Parkindo secara resmi menjadi satu-satunya wadah politik bagi umat Kristen pada April 1947. Tokoh-tokoh partai ini kemudian aktif berpolitik dan mampu mempertahankan hubungan baik dengan pemerintah kala itu. Pemilu 1955 menjadi pemilu pertama yang diikuti oleh Parkindo. Partai ini berhasil menduduki peringkat ke enam dengan raihan suara sebesar 1.003.326 dengan delapan kursi di DPR RI dan 988.810 suara dengan 16 kursi di Konstituante.

Salahsatu tokoh Parkindo yang sangat dipercaya oleh Sukarno adalah Johannes Leimena. Ia merupakan putra kebanggaan Maluku yang selalu ditunjuk untuk duduk di dalam kabinet. Jabatan yang pernah diembannya antara lain Wakil Ketua Fraksi Parkindo di DPR, Menteri Kesehatan hingga sebagai Wakil Menteri Pertama II, dan Wakil Perdana Menteri (Waperdam) II. Bahkan ia tidak kurang dari tujuh kali, pernah menjadi Pejabat Presiden menggantikan Sukarno saat ia berdinis ke luar negeri.

Setelah pergantian kepemimpinan dari Sukarno ke Soeharto, Parkindo masih tetap eksis. Parkindo juga ikut berkontestasi pada pemilu 1971 dan berhasil finish di urutan ke enam dengan raihan 733.359 suara dan tujuh kursi di DPR RI. Kondisi perpolitikan kemudian berubah drastis ketika Soeharto menerapkan kebijakan Fusi (Penggabungan Partai-partai). Kebijakan itu menandai berakhirnya Parkindo dalam kancah politik Indonesia karena partai ini kemudian bergabung bersama PNI, Murba, IPKI, dan Partai Katolik ke dalam sebuah wadah yang bernama Partai Demokrasi Indonesia (PDI).

## Referensi

- Ardanareswari, Indira, "Sejarah Pemilu 1977: Taktik Fusi Parpol ala Soeharto dan Orde Baru", <https://tirto.id/sejarah-pemilu-1977-taktik-fusi-parpol-ala-soeharto-orde-baru>.
- Aritonang, Jan S., "Minat dan Pilihan Politik Orang Kristen Indonesia 1955-2009 Sebuah Kajian Historis-teologis", *Jurnal STFTWS*, Volume 9 Nomor 2, 2009 (Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana, Malang).
- Danang Martinus, "Pemilu 1971: Pemilu Pertama Orde Baru dan Awal Dominasi Golkar", <https://kompaspedia.kompas.id/>.
- Darmansyah, dkk., *Johannes Leimena: Mutiara dari Maluku* (Jakarta: Museum Sumpah Pemuda, 2006).
- Feith Herbert, *Pemilihan Umum 1955 di Indonesia* (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 1999).
- Hakh, Samuel Benyamin, "Peranan Orang Kristen dalam Pusaran Politik di Indonesia: Suatu Tinjauan Historis-Teologis", *Jurnal Ilmiah Musik dan Agama*, Volume 2 Nomor 1, 2018 (Sekolah Tinggi Teologi Wesley Methodist Indonesia).
- Hastono Giri, "Dominasi ABRI dalam Politik dan Pengaruhnya terhadap Dewan Perwakilan Rakyat, Studi Tahun 1965-1985" (Skripsi Jurusan Ilmu Hukum UNAIR, 1987).
- Keppres No. 128 Tahun 1961 Tentang Mengakui sebagai Partai Sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 4 Penetapan Presiden Nomor 13 Tahun 1960.
- KPU, "Sejarah Lembaga Penyelenggara Pemilu", <https://kota-ambon.kpu.go.id/page/read/32/sejarah-lembaga-penyelenggara-pemilu#:~:text=Hal%20itu%20dicantumkan%20dalam%20Maklumat,akan%20diselenggara kan%20bulan%20Januari%201946>.
- Ngelow, Zakaria J., *Kekristenan dan Nasionalisme* (Jakarta: Gunung Mulia, 1996).
- Polin, Pavel Paulus, "Parkindo: Lika-liku Partai Kristen dalam Dunia Politik Indonesia", <https://narasisejarah.id/parkindo-lika-liku-partai-kristen-dalam-dunia-politik-indonesia/>.
- Sajili Hasan, "Gerakan Pemuda Islam Indonesia pada Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1963) Tuduhan Kontra Revolusi dan Pembubarannya" (Skripsi Jurusan Sejarah Universitas Indonesia, 2000).
- Salam, Sholichin, *Sedjarah Partai Muslimin Indonesia* (Jakarta: Lembaga Penyelidikan Islam Djakarta, 1970).
- Tim Redaksi, "Fusi Partai Politik 1973", <https://www.kompas.com/fusi-partai-1973>.
- Ward, Ken, *The Foundation of Partai Muslimin Indonesia* (Jakarta-Kuala Lumpur: Equinox Publishing, 1970).